UNIVERSITAS GADJAH MADA
Tanggung Jawab KPKNL Atas Hilangnya Minuta Risalah Lelang Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Perkara Perdata
TEGAR OKTAVIYAN Z, Dr. Sutanto, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TANGGUNG JAWAB KPKNL ATAS HILANGNYA MINUTA RISALAH LELANG DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

INTISARI

oleh

Tegar Oktaviyan Zamzammi[1]; Sutanto[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dalam hukum privat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila minuta risalah lelang yang disimpan hilang sekaligus mencari solusi hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat hilangnya minuta risalah lelang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penyusunan tesis ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pejabat Lelang dan Pegawai di lingkungan KPKNL untuk mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kelalaian KPKNL yang mengakibatkan hilangnya minuta risalah lelang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi, diantaranya adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan. Solusi hukum bagi KPKNL adalah dengan membuat laporan kehilangan dari pihak kepolisian dengan melampirkan bukti buku register lelang yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjut nya dalam pembuktian di Pengadilan KPKNL dapat mendatangkan Pejabat Lelang yang menyusun minuta risalah lelang tersebut sebagai bukti tambahan. Solusi hukum bagi pihak yang berkepentingan yaitu mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri setempat, agar salinan risalah lelang tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak yang terlibat di hadapan sidang Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Tanggungjawab, KPKNL, Minuta Risalah Lelang

[1] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tanggung Jawab KPKNL Atas Hilangnya Minuta Risalah Lelang Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Perkara Perdata
TEGAR OKTAVIYAN Z, Dr. Sutanto, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

RESPONSIBILITY OF KPKNL FOR THE LOST OF THE MINUTES OF AUCTION ACT REGARDING CIVIL CASE BURDEN OF PROOF PRINCIPLE

ABSTRACT

by

Tegar Oktaviyan Zamzammi[1]; Sutanto[2]

This research aims to determine and to analyze the responsibility in private law of the State Assets and Auction Office Service (KPKNL) if the Minutes of Auction Act that are saved are lost as well as looking for legal solution that can be implemented in resolving problems arising from the loss of Minutes of Auction Act.

This research uses normative juridical method, namely using library materials as the main data to analyze legal issues in the arrangement of this thesis. The researcher also conducted interviews with Auction Officers and Employees in the State Assets and Auction Office Service (KPKNL) environment to support this research. The data obtained by the research are obtained through library research and interviews which then are analyzed descriptively qualitatively.

Based on the research results, the researcher concludes that the KPKNL's negligence resulting in the loss of Minutes of Auction Act can be qualified as an Act against the Law. The elements of the act against the law as stated in Article 1365 of the Civil Code have been fulfilled, including the existence of an act, the act against the law, a mistake, a loss, and a causal relationship between the act. The legal solution for the State Assets and Auction Office Service (KPKNL) is by making a loss report from the police by attaching the evidence of the auction register book that has been printed and signed by the Head of the Office. Furthermore, in the burden of proof at the State Assets and Auction Office Service (KPKNL) Court, it can bring Auction Officials who compile the Minutes of Auction Act as additional evidence. Legal solution for interested parties is by submitting a request for Determination to the local District Court, so that the copy of the Minutes of Auction Act is determined by the parties involved before the District Court hearing.

Keywords: Responsibility, KPKNL, Minutes of Auction Act

---

[1] The Student of Magister of Law on Gadjah Mada University
[2] The Lecturer of Law Faculty on Gadjah Mada University, Yogyakarta